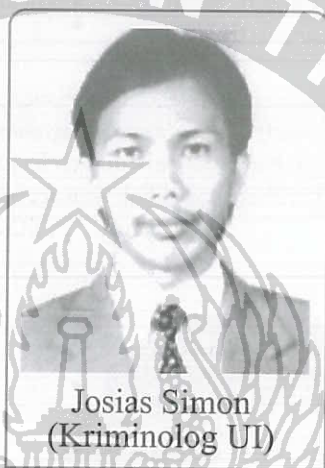


# Perempuan dan Keamanan

**TRADISI BERBICARA** mengenai keamanan, hingga saat ini, masih identik dengan urusan laki-laki. Kebiasaan ini umumnya tertanam dalam tatanan masyarakat patron-klien atau paternalistik di sebagian besar komunitas Indonesia yang membedakan tugas eksternal dan internal pria dan wanita secara terbatas. Sebagai contoh, urusan keluarga seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak adalah tugas perempuan, sedangkan urusan luar rumah seperti mencari nafkah, melindungi dan mengamankan keluarga adalah urusan laki-laki.



Josias Simon  
(Kriminolog UI)

Pembagian tugas ini tidak saja langgeng pada unit terkecil yaitu keluarga, tapi juga meluas pada pranata sosial dan kelembagaan pemerintahan lebih besar. Masih sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan penting dalam lembaga sosial atau instansi pemerintah merupakan gambaran sekilas tidak meratanya kesempatan di antara laki-laki dan perempuan. Polemik timbul di antara pihak yang mendukung dan menolak kesenjangan gender ini. Tanpa bermaksud mengabaikan perdebatan ini, satu hal yang pasti, telah terjadi perubahan signifikan peran perempuan dalam berbagai bidang baik sosial, ekonomi, politik maupun keamanan.

Dalam Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, April 2000, Sekjen PBB Kofi Annan mengemukakan "*to born female is not a crime*", menjadi perempuan merupakan anugerah sangat indah yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Kepentingan hidup perempuan juga amatlah luas, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan ekonomi sampai penghapusan kekerasan

terhadap perempuan (keamanan perempuan).

Perhatian terhadap perempuan, persoalan dan kebutuhannya makin meningkat, terutama dalam konstruksi peran dan posisi perempuan dalam pembangunan yang setara, non-diskriminasi dan berkeadilan jender. Saat ini terjadi pergeseran peran dan posisi perempuan dari lingkungan reproduktif ke lingkungan produktif (Ihromi: 1995).

**Perspektif Gender.** Sebuah perspektif yang tengah menguat wacananya saat ini adalah perspektif gender, mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender, agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankamnas (pertahanan dan keamanan nasional). Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), menjelaskan pentingnya 4 aspek utama yakni ketersediaan akses, peran, kontrol dan manfaat, yang tidak seksis (berpihak pada satu jenis kelamin saja) pada tiap lembaga formal, informal dan setiap aktivitas masyarakat.

Aspek pertama yaitu akses, meru peluang atau kesempatan yang (perempuan dan laki-laki) memperoleh atau menggunakan sumber daya alami maupun non alami tersedia. Kedua, peran, dan kewenangan yang setara, diberikan ruang lingkup jabatan atau struktur kelembagaan tertentu. Ketiga, ke yakni bagaimana mengawasi kewen atau kekuatan dalam menentu kebijakan, di mana tiap lembaga memperhatikan kepentingan peren secara berimbang. Dan yang ter manfaat, terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang bermanfaat masyarakat secara keseluruhan khusus perempuan.

**Peran dalam Lembaga Keam.** Berdebat soal perempuan dan kean masih menyisakan keraguan bebb kalangan mengenai keterlibatan p perempuan dalam bidang ini (keam karena sifatnya berbeda dengan b lain secara umum seperti bidang atau ekonomi. Menepis keraguan beberapa pihak yang berpanda berbeda menegaskan bahwa bi keamanan saat ini sudah tidak lagi id dengan acuan membanggakan keki fisik, adu otot, penampilan garany tampil kaku, tetapi mengacu perlindungan orang, informasi, si fisik dengan mengutamakan s persuasif, tampil ramah, mementir kekuatan non-fisik. Perubahan tam bidang keamanan ini membuka pel besar keikutsertaan perempuan d arena keamanan karena lebih memc kriteria acuan yang dimak

Tren keamanan baru mengacu keamanan manusia (*human security*)

dikatakan berjalan selaras dengan perspektif gender secara konseptual maupun implementasinya. Akses perempuan di berbagai lembaga militer, instansi kepolisian, organisasi para-militer, dinas intelejen, maupun perusahaan keamanan swasta, cukup terbuka, bahkan telah menampilkan sosok personil perempuan yang tangguh, baik secara individual maupun sebagai satu kesatuan tugas tertentu.

Peran perempuan tidak semata menonjolkan peran tradisionilnya tapi mampu menunjukkan kemampuan profesionalnya dengan menguasai peralatan teknologi informasi dan persenjataan tempur dalam pasukan militer atau instansi kepolisian, atau berperan langsung memberikan jasa layanan pengamanan kepada masyarakat umum yang difasilitasi oleh berbagai perusahaan keamanan swasta.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai satuan pengamanan (satpam) perempuan, entah itu di area pemukiman, perbelanjaan, ataupun perkantoran. Pekerjaan sebagai petugas keamanan ini bukan hal mudah, karena di satu sisi ia harus menjaga keamanan lokasi dengan penuh kewaspadaan, di sisi lain ia dituntut ramah dan simpatik terhadap semua pengunjung, tamu yang datang, atau mereka yang sekedar iseng ingin membuang waktu saja di lokasi tersebut. Kehadiran satpam perempuan juga berperan dalam mengantisipasi ragam perilaku kejahatan dengan pelaku perempuan yang sulit dilacak oleh satpam laki-laki. Modus kejahatan pelaku perempuan menjadi kecenderungan umum dalam jenis kejahatan tertentu.

Akses, peran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai lembaga keamanan secara kualitas tak diragukan lagi, hanya mungkin perlu dipikirkan pemenuhannya dari segi jumlah (kuantitas) sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga keamanan serta tentu mengikuti tren keamanan antisipatif.

Persoalan pokok bahasan perempuan

dan keamanan, ternyata bukan saja mengkaji peran perempuan dalam lembaga keamanan, tapi ada hal krusial lain yang harus didalami yaitu kenyataan bahwa pihak perempuan lebih sering menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat diterapkannya kebijakan keamanan tertentu baik secara global maupun lingkup sempit. Keterlibatan perempuan dalam bidang keamanan tidak hanya duduk dalam jajaran atau struktur lembaga keamanan, tapi ikut mengontrol kebijakan keamanan serta implementasinya dalam kondisi perang maupun masa damai.

**Korban Kebijakan Keamanan.** Perempuan adalah korban utama dalam wilayah konflik bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan perang, dan kondisi berbahaya lainnya. Perang Dunia I maupun II menjadi gambaran aksi kekerasan terhadap perempuan, di mana perempuan adalah sasaran inkonsistensi kebijakan keamanan yang diambil. Bentuk kebijakan keamanan waktu itu tidak memperhatikan dampak atau akibat bagi pihak perempuan, semata-mata hanya mengutamakan kepentingan, ambisi politik kelompok dan pribadi tertentu.

Berkait dengan hal ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 yang intinya mendesak pelaku kebijakan keamanan mensosialisasikan dan melaksanakan persetujuan perdamaian menggunakan perspektif gender, demi menjamin hak-hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan. Di samping itu, menghimbau untuk memperbesar porsi keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, *peacekeeping operations*, rekonstruksi, rehabilitasi, perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (PU-DCAF : 2003). Rekomendasi lebih jauh yang diberikan adalah menyarankan untuk melibatkan perempuan tidak hanya pada tingkatan dinas administratif, logistik atau bantuan angkatan bersenjata saja, tapi sebagai pendukung operasional pasukan bersenjata, dalam kondisi damai atau perang. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan

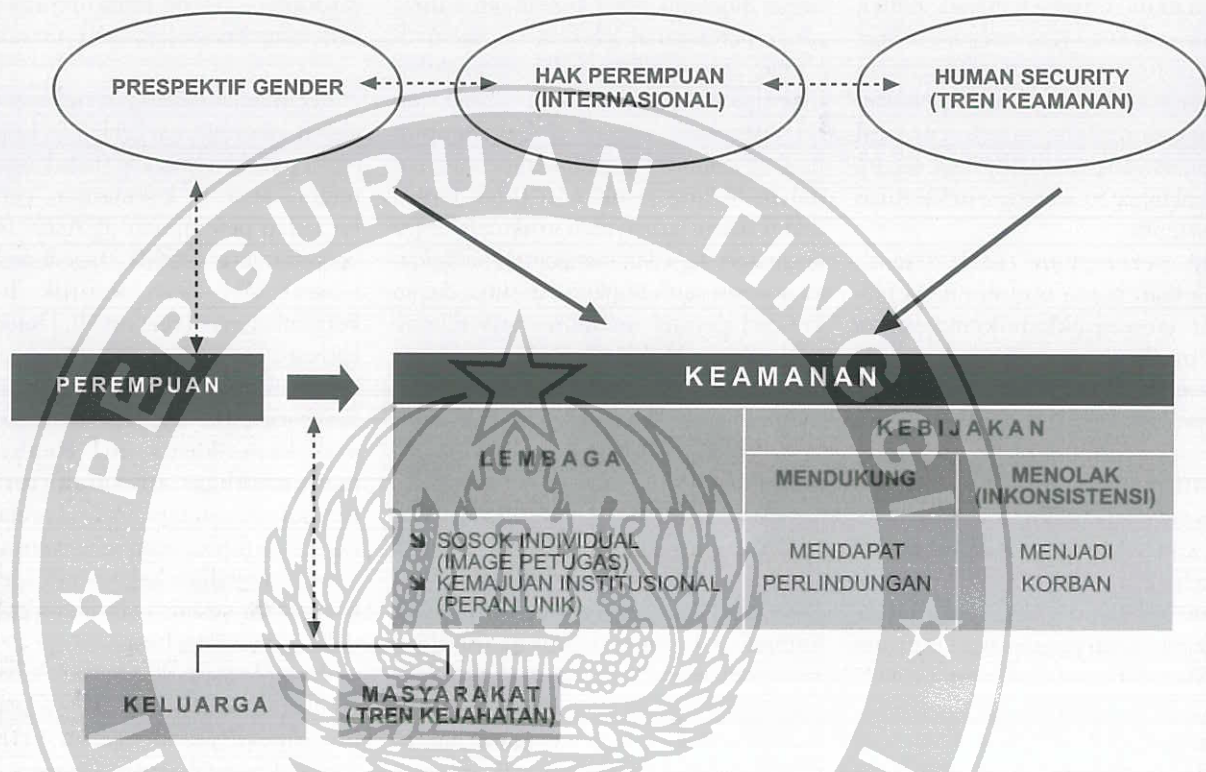
keamanan diharapkan dapat menyuntikkan perhatian lebih terhadap para korban perempuan (keamanan perempuan) terutama saat berlangsungnya masa damai, kekerasan bersenjata atau masa darurat.

Kerentanan perempuan sebagai akibat inkonsistensi kebijakan keamanan dapat pula kita saksikan pada kasus konflik di negeri-negeri seperti kekejaman terhadap perempuan di Aceh (sebelum operasi militer/DOM), tragedi perkotaan massal Mei 1998, konflik di Timor Leste, Pertambangan Freeport di Timika dan berbagai kasus lain, yang sampai sekarang mengundang sejumlah pertanyaan: tanggungjawab siapakah soal keamanan atas kasus-kasus ini? Realita menunjukkan ancaman terhadap keamanan perempuan berkorelasi dengan peristiwa besar sebelumnya serta adanya kejadian kekacauan ideologi, kerusuhan sosial, kejatuhan ekonomi dalam skala yang luas.

Pengalaman berbagai kasus menunjukkan sudah waktunya keamanan perempuan mendapatkan perhatian kajian dan pembahasan bersama di berbagai bidang lain yang lebih luas, agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi perempuan, sebagaimana dikemukakan dalam konferensi perempuan dunia ke 4 di Beijing yang menegaskan perlunya strategi bersama perempuan dan laki-laki dalam dimensi integral, meliputi perencanaan, implementasi, pemantauan dan peninjauan atas pengambilan kebijakan secara kolektif. Laki-laki dan perempuan dapat memanfaatkan secara sama atas berbagai tindakan maupun tanggungjawab kebijakan keamanan yang diambil, sendiri tapi secara bersama.

Pada bagian akhir dari ulasan ini kita tarik benang merah bahwa persoalan yang terkait dengan perempuan dan keamanan mempunyai hubungan dengan beberapa aspek berikut ini (lihat tabel 1): pertama, tren keamanan berubah; kedua, image perempuan pengamanan yang simpatik ("sanggar"); ketiga, tugas dan peran perempuan dalam lembaga keamanan

Tabel 1 - Perspektif Gender dan Keamanan



keempat, tren kejahatan dengan pelaku perempuan; kelima, korban perempuan akibat inkonsistensi kebijakan, dan keenam, hak perempuan secara internasional dan nasional.

Keenam aspek ini berlangsung menurut kebudayaan dan sistem keamanan masing-masing negara, karena setidaknya berbagai aturan internasional tentang perempuan

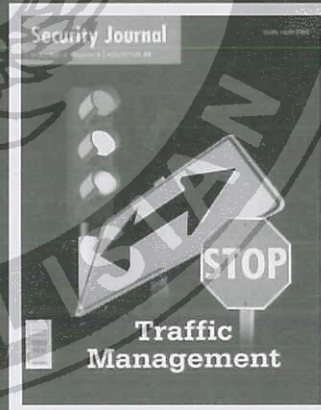
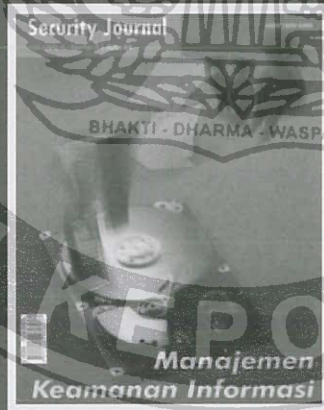
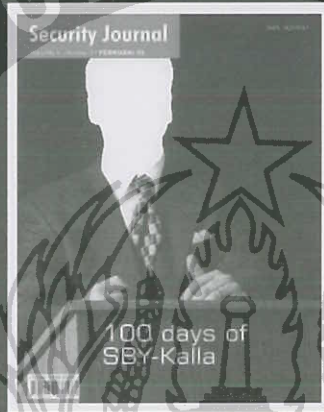
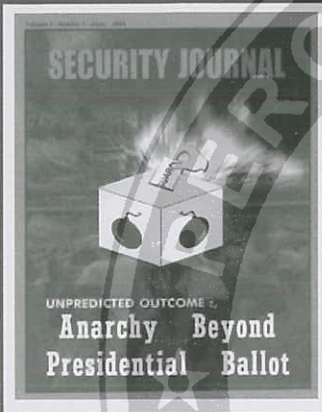
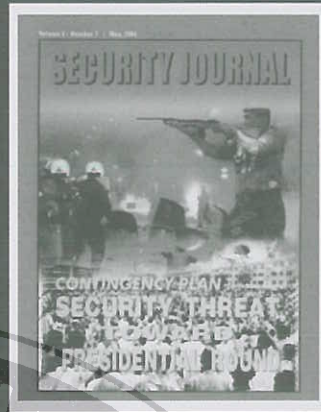
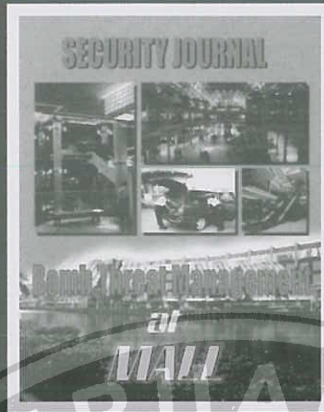
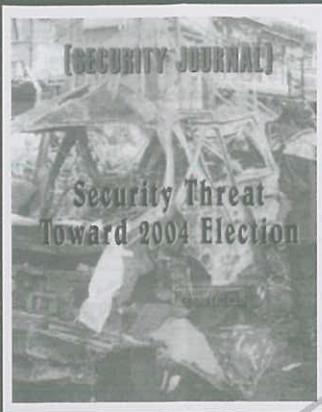
dan keamanan dapat dijadikan acuan universal dalam melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sama. Perspektif gender diharapkan dapat menjembatani, melindungi pihak perempuan dalam mendapatkan solusi terbaik atas berbagai persoalan keamanan yang dihadapi. Aplikasi perspektif gender harus menjadi program kerja berbagai pihak, lembaga

keamanan internasional, nasional, maupun perusahaan keamanan swasta agar bisa berperan sebagai pendorong perubahan di masyarakat siap menghadapi arus globalisasi dengan menguatnya dorongan hak manusia khususnya hak perempuan dalam keamanan.

## Ingin Berlangganan Security Journal ?

Hubungi kami:  
**PT Indosearch Media Pratama**  
 Plaza Fortune lantai 1  
 Jl. Mampang Prapatan 96 Jakarta Selatan  
 Telp/Fax: (021) 7948718





Keamanan adalah kebutuhan mendasar setiap manusia masyarakat oleh karenanya harus mampu menciptakan kondisi aman di lingkungan pemukimannya

# Security Journal

T/F: (021) 7948718 - email : sjournaljkt@telkom.net